GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar	**:**	**Kompas**	**Tgl/Bln/Thn**	**:**	**15 November 2007**
Subyek	**:**	**perubahan iklim**	**Hari**	**:**	**Kamis**
			Halaman	**:**	**13**

Peran Dipertegas

Menahan Laju Deforestasi Tanpa Tunggu Insentif

Jakarta, Kompas - Peran setiap negara untuk menekan laju peningkatan emisi gas rumah kaca kembali dipertegas agar diwujudkan secara nyata. Meskipun demikian, negara-negara maju tetap didorong memberikan insentif atau transfer teknologinya untuk adaptasi dan mitigasi bencana dampak perubahan iklim bagi negara-negara berkembang.

Demikian dikatakan Kevin Grose selaku Koordinator Pelayanan Informasi Sekretariat UNFCCC yang berada di Bonn, Jerman, pada pertemuan dengan wartawan dari berbagai media di Tanah Air di kantor Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Rabu (14/11).

"Kata 'kerangka kerja' di dalam istilah Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC) merupakan kata paling penting. Kerangka kerja itu dicapai melalui satu kesepakatan yang kemudian mengikat negara- negara supaya meratifikasi dan mengaplikasikannya melalui undang-undang di negara masing- masing," kata Kevin.

Kevin menuturkan, isu perubahan iklim sudah tidak lagi sekadar menyangkut kepentingan lingkungan hidup. Namun, sudah meluas pada aspek keamanan pangan, ketersediaan air bersih, kesehatan masyarakat, gangguan cuaca berupa badai yang kian meningkat intensitas serta ancamannya, dan sebagainya.

Peran setiap negara untuk program mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim harus diwujudkan.

Bahkan, pada Pertemuan Para Pihak (COP) Ke-13 dalam UNFCCC di Bali pada 3-14 Desember 2007 nanti diinginkan kerja sama multilateral antarbangsa di bawah kerangka kerja UNFCCC supaya ditingkatkan.

"Pada COP-13 UNFCCC di Bali nanti diharapkan akan ada mandat yang akan lebih komprehensif," ujar Kevin.

Aksi nyata

Secara terpisah, Direktur Program Iklim dan Energi World Wildlife Fund for Nature (WWF) Indonesia Fitrian Ardiansyah mengatakan, peran setiap negara yang kembali dipertegas dalam kaitan mitigasi dan adaptasi bencana dampak perubahan iklim menuntut aksi-aksi yang nyata.

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

Indonesia membutuhkan rencana aksi nasional untuk menghadapi perubahan iklim sehingga pemerintah sampai di tingkat paling rendah bisa menerapkan kebijakannya dalam menghadapi perubahan iklim sekarang," kata Fitrian.

Dia menegaskan, aksi nyata dapat diwujudkan seperti menahan laju deforestasi saat ini, Indonesia tidak perlu menunggu insentif dari negara-negara maju.

Meskipun diakuinya, perlu pula memperjuangkan adanya insentif dari negara maju sebagai keterlibatan dalam mewujudkan tanggung jawab mencegah lepasnya emisi karbon dari kegiatan deforestasi.

Menurut Fitrian, pada COP-13 UNFCCC di Bali, delegasi Indonesia akan memperjuangkan empat isu penting, yaitu meliputi pelaksanaan program adaptasi perubahan iklim, reduksi emisi melalui pencegahan deforestasi dan degradasi, transfer teknologi, serta keberlanjutan komitmen mekanisme pembangunan bersih (clean development mechanism/CDM) sesuai dengan amanat Protokol Kyoto.

"Peran negara secara nyata sekarang juga dapat diwujudkan dengan memperjelas tata pemerintahan dalam penerimaan hak atas insentif reduksi emisi. Sampai sekarang pemerintah di berbagai daerah juga belum jelas mengenai pembagian hak-hak atas perdagangan karbon jika reduksi emisi dengan mencegah deforestasi berhasil dilakukan," kata Fitrian.

Selama ini beberapa daerah berinisiatif masuk dalam perdagangan karbon secara bilateral dengan negara maju. (NAW)

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP